

KONTRIBUSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH (BPPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM DIPLOMASI MARITIM SEBAGAI BAGIAN DARI VISI POROS MARITIM DUNIA

Oleh
Nur Anisa
NIM. 2205050004

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai beranda terdepan maritim Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di jalur pelayaran global Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dengan posisi geografis yang sangat strategis dan potensi ekonomi yang besar, pemerintah berupaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang memiliki peran penting dalam mengelola wilayah perbatasan. Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah utama dalam implementasi visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi serta signifikansi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim guna mendukung visi Poros Maritim Dunia, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPPD Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim dan pencapaian visi Poros Maritim Dunia dinilai belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh dominasi pengelolaan keamanan laut yang masih bersifat sentralistik di tangan pemerintah pusat, lemahnya koordinasi lintas sektoral di lapangan, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran daerah. Aktivitas non-militer yang dijalankan belum mampu secara optimal berfungsi sebagai *Confidence Building Measures* (CBMs) yang berdampak luas karena terkendala oleh ego sektoral antarlembaga penegak hukum dan minimnya kewenangan formal daerah dalam ranah diplomasi internasional. Dengan demikian, kontribusi desentralistik lembaga daerah seperti BPPD masih menghadapi hambatan struktural yang besar dalam memperkuat diplomasi maritim nasional demi mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kata Kunci: Kontribusi, BPPD Kepulauan Riau, Diplomasi Maritim, Paradiplomasi, Poros Maritim Dunia

**THE CONTRIBUTION OF THE REGIONAL BORDER MANAGEMENT
AGENCY (BPPD) OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE TO MARITIME
DIPLOMACY AS PART OF THE VISION FOR A GLOBAL MARITIME
FULCRUM**

By
Nur Anisa
NIM. 2205050004

Abstract

This research is motivated by the strategic position of the Riau Islands Province as Indonesia's maritime frontline, directly bordering neighboring countries along the global shipping lanes of the Malacca Strait and the North Natuna Sea. Given its highly strategic geographic position and significant economic potential, the government seeks to maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia by establishing the Regional Border Management Agency (BPPD), which plays a crucial role in managing border areas. The Riau Islands are one of the key regions in the implementation of Indonesia's Global Maritime Fulcrum vision. The objective of this study is to analyze the contribution of the Riau Islands Provincial Regional Border Management Agency to maritime diplomacy in support of the Global Maritime Fulcrum vision, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques involving in-depth interviews with key informants and a review of relevant documents. The research findings indicate that the contribution of the Riau Islands Regional Development Planning Board (BPPD) to maritime diplomacy and the realization of the Global Maritime Fulcrum vision is not yet considered significant. This is due to the continued centralization of maritime security management under the central government, weak cross-sectoral coordination on the ground, and limitations in regional infrastructure and budgets. The non-military activities carried out have not been able to function optimally as Confidence Building Measures (CBMs) with broad impact, as they are hampered by inter-agency egos among law enforcement agencies and the lack of formal regional authority in the realm of international diplomacy. Consequently, the decentralized contributions of local institutions such as the BPPD still face significant structural obstacles in strengthening national maritime diplomacy to realize Indonesia's vision as the World Maritime Fulcrum.

Keyword: Contributions, Riau Islands Regional Development Planning Board, Maritime Diplomacy, Paradiplomacy, Global Maritime Fulcrum